

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah salah satu jenis atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Ini adalah pemahaman paling dasar tentang demokrasi yang dikenal oleh hampir semua orang. Secara esensial, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, di mana dalam sistem politik yang demokratis, warga memiliki hak, kesempatan, dan suara yang setara dalam mengatur pemerintahan dalam ranah publik negara.¹ Lebih lanjut, demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip egalitarianisme dan partisipasi aktif dari setiap individu dalam masyarakat. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pandangan politiknya, memilih wakil mereka melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil, serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam demokrasi, transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan publik. Selain itu, demokrasi tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang luas.

Konsep demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih pemimpin dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Pada era kemerdekaan Indonesia dan Amerika Serikat, kedua

¹R. E Syafitri, 2018. "Demokrasi Di Indonesia dan Amerika Serikat: Sebuah Analisis Perbandingan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 5, No 2, 101–16.

negara tersebut memiliki tantangan yang sama, yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis setelah melalui periode penjajahan yang panjang. Oleh karena itu, para pemimpin di kedua negara tersebut memiliki konsep dan pemikiran yang sama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Konsep demokrasi telah berkembang selama berabad-abad. Ada banyak sekali tokoh yang telah memberikan kontribusi dalam perkembangan konsep demokrasi. Tentu termasuk konsep demokrasi yang diusung oleh dua tokoh besar dalam sejarah dunia, yaitu Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln.

Mohammad Hatta adalah seorang tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta menjadi wakil presiden pertama Indonesia setelah kemerdekaan. Sementara itu, Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang terkenal dengan perannya dalam mempertahankan persatuan negara dan menghapuskan praktik perbudakan di Amerika Serikat. Perbandingan konsep demokrasi antara Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln dapat memberikan gambaran tentang perbedaan pendekatan dan pandangan dalam membangun negara demokratis pada era yang berbeda. Pada saat Mohammad Hatta memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, konsep demokrasi masih terbilang baru dan belum terlalu dikenal di Indonesia. Sebaliknya, pada saat Abraham Lincoln menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, konsep demokrasi sudah berkembang dan menjadi prinsip utama dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat.² Pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945, Mohammad Hatta

² Lukman, N. R., & Nugraha, A. 2020. "The Concept of Democracy in Abraham Lincoln's Speeches and Mohammad Hatta's Speeches". *The Journal of Social Sciences Research*. Vol. 6, No 10, 918-926.

sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia mengemukakan konsep demokrasi yang ia anggap cocok dengan kondisi Indonesia saat itu. Konsep demokrasi yang diusung oleh Hatta dalam “Demokrasi Kita” ini bertumpu pada nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kebebasan individu serta kerakyatan yang dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat. Dalam buku ini, Hatta menekankan bahwa demokrasi bukanlah hanya bentuk pemerintahan, tetapi juga filosofi dan pandangan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Hatta menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan negara. Ia meyakini bahwa keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan bergantung pada partisipasi aktif rakyat dalam seluruh proses kebijakan publik. Konsep ini sejalan dengan pandangan Hatta bahwa rakyat adalah subjek dan bukan hanya objek dalam sistem pemerintahan. Buku "Demokrasi" juga mengungkapkan pandangan Hatta tentang pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dalam menciptakan masyarakat yang adil. Ia menolak kapitalisme yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang besar dan menekankan perlunya sistem ekonomi yang berbasis pada sosialisme demokratis, di mana kekayaan dan sumber daya negara dikelola untuk kepentingan bersama rakyat.³ Mohammad Hatta yang berpegang teguh terhadap kerakyatan merupakan sebagai dasar pandangan demokrasi Indonesia yang bertumpu pada rakyat. Konsep kerakyatan Mohammad Hatta merupakan cita-cita luhur yang diperjuangkan Mohammad Hatta sejak ikut

³ Hatta, Mohammad. 2014. *Demokrasi Kita*. Bandung: Segi Arsy.

dalam *Jong Sumateran Bond* (JSB) sampai dengan akhir hayatnya. Dalam menegakkan demokrasi Indonesia.⁴

Hatta mengemukakan bahwa di Indonesia, terdapat tiga sumber utama yang menjadi landasan bagi demokrasi. Pertama, pengaruh sosialisme Barat yang memperjuangkan prinsip-prinsip humanisme telah meresap dalam masyarakat, di mana prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dianggap sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan, tetapi juga sebagai tujuan yang ingin dicapai. Kedua, ajaran Islam memberikan tuntunan untuk menjalankan kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran Tuhan dalam struktur sosial masyarakat. Ketiga, pola hidup kolektivisme yang terwujud dalam kehidupan desa-desa di seluruh Indonesia turut berperan sebagai sumber demokrasi, di mana kerjasama dan kebersamaan dianggap sebagai nilai yang sangat penting dalam membangun dan mengatur kehidupan masyarakat.⁵ Ketiga sumber inilah, yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia. Hatta pernah mengemukakan sebagai berikut:

“Berdasarkan kepada pengalaman di benua Barat, dan bersedia pula dalam susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kedaulatan kita memiliki kedua-duanya: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. dengan mudah kita dapat mengemukakannya, oleh karena masyarakat

⁴ Noer, Deliar. 2012. *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas.

⁵ Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

kita tidak mengandung penyakit individualisme. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme.”⁶

Pada tahun 1865, Amerika Serikat yang telah memproklamirkan kemerdekaannya sejak tahun 1776, telah mencapai masa-masa pemilihan presiden yang ke-16. Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika Serikat, juga telah menyuarkan konsep demokrasi yang berfokus pada prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan individu serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Lincoln menegaskan bahwa "pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" harus dijaga dengan baik.⁷ Konteks sejarah, kedua tokoh ini memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai tentang demokrasi di negara masing-masing. Perbandingan konsep demokrasi antara Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln dapat memberikan gambaran tentang perbedaan pendekatan dan pandangan dalam membangun negara demokratis pada era yang berbeda.

Analisis perbandingan, akan dilakukan kajian dan diperlukan pemahaman yang kuat tentang konsep demokrasi menurut kedua tokoh dan konteks sejarah pada saat itu. Hal ini akan meliputi pandangan mereka terhadap hak asasi manusia, hak minoritas, sistem pemerintahan yang ideal, dan bagaimana konsep demokrasi dapat diterapkan dalam konteks negara yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Perlu ditekankan bahwa konsep demokrasi menurut Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln memiliki perbedaan, namun pada akhirnya, kedua konsep tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kebebasan,

⁶ Zubaidi, A, 2011. “Landasan aksiologis pemikiran bung hatta tentang demokrasi”. *Jurnal Filsafat*. Vol. 21 (2), hlm. 87-98.

⁷ A. Faidi, S.Hum. 2018. *Abraham Lincoln Hidup dan Mati Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Penerbit Laksana.

kesetaraan, dan keadilan bagi rakyat. Hasil dari analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep demokrasi dan bagaimana konsep tersebut dapat diadaptasi di Indonesia dan Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan konsep demokrasi menurut Mohammad Hatta dengan Abraham Lincoln?”

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Profil Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln?
2. Bagaimana pandangan Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln terhadap demokrasi?
3. Bagaimana perbandingan konsep demokrasi Mohammad Hatta dengan Abraham Lincoln?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, dapat dipahami bahwa peneliti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Profil Mohammad Hatta Abraham Lincoln.
2. Untuk mengetahui pandangan Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln terhadap demokrasi.
3. Untuk mengetahui perbandingan konsep demokrasi Mohammad Hatta dengan Abraham Lincoln.

1.4. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis, praktis maupun Empiris, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian perbandingan konsep demokrasi menurut Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai bahan referensi untuk mengembangkan konsep demokrasi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan membandingkan kedua konsep tersebut, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan konsep demokrasi yang ada.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian perbandingan konsep demokrasi menurut Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln dapat memberikan kegunaan praktis dalam mengembangkan sistem demokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan memahami perbedaan dan persamaan kedua konsep tersebut, dapat dihasilkan suatu sistem demokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Kedua teori ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki sistem demokrasi yang masih memiliki kekurangan.

1.4.3. Kegunaan Empiris

Penelitian perbandingan konsep demokrasi menurut Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln juga memiliki kegunaan empiris dalam memperkuat argumentasi dan bukti-bukti dalam membangun suatu sistem demokrasi yang baik dan benar. Melalui analisis perbandingan, dapat dihasilkan data dan fakta yang dapat

digunakan untuk memperkuat keyakinan dan pendapat tentang konsep demokrasi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, perbandingan ini juga dapat memberikan informasi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses membangun sistem demokrasi di kedua negara tersebut.

1.5. Landasan Teoritis

1.5.1. Kajian Teori

1.5.1.1. Teori Demokrasi

Teori demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara demokratis. Sebagai suatu konsep, demokrasi telah dikenal sejak zaman kuno dan telah mengalami perkembangan dan perubahan sepanjang sejarah. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Teori demokrasi secara umum mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar sistem pemerintahan demokratis. Ini termasuk partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik, hak asasi manusia, perlindungan minoritas, pemisahan kekuasaan, kebebasan berbicara dan pers, serta sistem hukum yang adil dan independen. Teori ini menegaskan bahwa pemerintahan yang sah harus didasarkan pada konsensus dan mewakili kehendak mayoritas sambil melindungi hak-hak individu.⁸

⁸ Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Teori demokrasi muncul sebagai respons terhadap berbagai faktor sosial, politik, dan intelektual yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Hal ini mencakup keinginan untuk partisipasi politik yang lebih luas, keadilan, pemikiran filosofis, perubahan sistem pemerintahan, dan pengalaman sejarah. Teori-teori ini terus berkembang seiring waktu dan merupakan dasar bagi berbagai sistem demokrasi yang ada di dunia saat ini. Selanjutnya, terdapat dua teori demokrasi yang penting dan utama dalam sejarah perkembangan sistem pemerintahan demokrasi ini. Peneliti akan menjelaskan dua di antaranya, yaitu Teori Demokrasi Klasik dan Teori Demokrasi Modern menurut beberapa ahli.

1.5.1.2. Teori Demokrasi Klasik

Secara historis, teori demokrasi dapat ditelusuri hingga zaman kuno yang berasal dari kota-kota kuno di Yunani, terutama Athena, pada abad ke-5 SM. Di Athena, sistem demokrasi dikembangkan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik secara langsung melalui mekanisme seperti rapat umum (ekklesia) dan juri rakyat (dikasteria). Dalam sistem ini, warga negara laki-laki berhak berpartisipasi dalam proses politik, sementara perempuan dan budak dilarang terlibat dalam keputusan politik.⁹

Plato adalah murid Socrates dan penulis karya terkenal "The Republic". Dalam karyanya ini, Plato memberikan pandangan kritis tentang demokrasi dan menganggapnya sebagai bentuk pemerintahan yang tidak ideal. Plato menyatakan

⁹ Alim Roswanto, 2015. "Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles", *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*. 123–138.

bahwa demokrasi rawan terhadap kerusuhan dan kekacauan karena memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak layak atau tidak kompeten untuk memegang kekuasaan politik. Menurutnya, demokrasi cenderung menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hanya mendasarkan kekuasaan pada hasrat, popularitas dan pandangan mayoritas, tanpa mempertimbangkan kebenaran atau keadilan. Plato menyajikan negara ideal sebagai negara yang dipimpin oleh filosof-raja. Menurutnya, hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan filosofis dan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan keadilan yang seharusnya memerintah negara. Para filosof-raja ini akan mengetahui apa yang terbaik untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri atau kelompok kecil tertentu.¹⁰

Aristoteles adalah seorang filsuf dan murid Plato, ia juga menyumbangkan pandangannya tentang demokrasi dalam karyanya “Politika”, ia membahas berbagai bentuk pemerintahan, termasuk demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Aristoteles memberikan pandangan yang lebih mendukung terhadap demokrasi. Membagi bentuk pemerintahan menjadi tiga tipe utama: monarki, aristokrasi, dan politeia. Aristoteles menjelaskan bahwa monarki adalah pemerintahan satu orang yang baik dan bijaksana, aristokrasi adalah pemerintahan para aristokrat atau elit yang bijaksana, sedangkan politeia adalah pemerintahan rakyat yang berdaulat dan menekankan kesetaraan. Namun, Aristoteles juga menyadari bahwa setiap bentuk pemerintahan dapat melenceng ke bentuk yang buruk. Misalnya, monarki dapat

¹⁰ *Ibid.*

berubah menjadi tirani, aristokrasi menjadi oligarki, dan politeia dapat berubah menjadi demokrasi yang tak terkendali.

Aristoteles menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik daripada tirani atau oligarki, ia mengingatkan tentang potensi masalah yang dihadapi oleh demokrasi langsung. Menurutya, demokrasi cenderung berubah menjadi ochlocracy, yaitu penguasaan oleh kerumunan orang banyak yang tidak terorganisir. Aristoteles juga menyoroti pentingnya pembatasan hukum dan keadilan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam sistem demokrasi.¹¹ Secara keseluruhan, Teori Demokrasi Klasik menekankan pada pertimbangan tentang bagaimana pemerintahan seharusnya berfungsi dan siapa yang layak memimpin. Plato cenderung skeptis terhadap demokrasi karena ia menganggapnya rentan terhadap tirani mayoritas dan pemimpin yang tidak kompeten. Sementara itu, Aristoteles lebih mendukung demokrasi yang seimbang dan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat.

Konteks teori demokrasi klasik, penting untuk diingat bahwa konsep dan implementasi demokrasi pada masa Yunani kuno dapat berbeda dengan pemahaman modern tentang demokrasi. Meskipun mereka memberikan dasar bagi perkembangan demokrasi selanjutnya, teori-teori ini tidak sepenuhnya mencakup konsep demokrasi modern yang lebih kompleks dan inklusif. Teori Demokrasi Klasik ini merupakan dasar dari perkembangan gagasan demokrasi dalam sejarah politik dan pemikiran manusia. Meskipun pandangan Plato dan Aristoteles memiliki kritik dan tantangan, gagasan-gagasan mereka tentang bentuk

¹¹ *Ibid.*

pemerintahan dan pemerintahan yang baik tetap relevan dan menjadi pijakan bagi pemikiran politik modern.

1.5.1.3. Teori Demokrasi Modern

Munculnya Teori Demokrasi modern disebabkan oleh evolusi pemikiran politik dan peristiwa bersejarah yang membentuk pandangan baru tentang pemerintahan dan partisipasi politik. Pemikiran filosofi Yunani kuno khususnya pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles telah memberikan dasar bagi konsep demokrasi, membahas konsep-konsep politik, termasuk peran warga negara dalam pemerintahan. Selanjutnya, Teori demokrasi modern yang lebih terstruktur dan formal berkembang pada abad ke-17 dan ke-18, Ketika para pemikir John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu adalah tiga pemikir politik yang paling berpengaruh dalam perkembangan teori demokrasi modern.

Mereka hidup pada abad ke-17 dan ke-18, pada masa yang dikenal sebagai Abad Pencerahan. Abad Pencerahan adalah periode intelektual yang ditandai oleh penekanan pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pandangan kritis terhadap struktur politik dan sosial yang ada. Pada masa ini, terjadi perubahan besar dalam cara berpikir tentang politik dan pemerintahan, dengan penerapan pemikiran ilmiah dan filosofis dalam merumuskan konsep-konsep politik baru. Seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu mengembangkan konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang melindungi hak asasi manusia dan memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat.¹²

¹² R, Mochtar. 2017. *Teori Demokrasi*. Jakarta: Kencana.

John Locke, seorang filsuf dan teoritikus politik Inggris pada abad ke-17, Dalam karyanya yang terkenal, “Two Treatises of Government” berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilakukan dengan persetujuan mayoritas rakyat. Locke percaya bahwa hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan dan hak atas kepemilikan pribadi. Ia juga menganggap bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menurut Locke, pemerintah dibentuk atas kesepakatan antara rakyat dan penguasa, sehingga penguasa harus bertanggung jawab pada rakyat dan melindungi hak-hak mereka. Locke juga mengemukakan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan kekuasaan, sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan terlalu besar.¹³

Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf, penulis, dan pemikir politik Prancis pada abad ke-18, dengan karyanya yang terkenal, "The Social Contract". Mengungkapkan bahwa demokrasi ideal adalah bentuk pemerintahan yang melibatkan partisipasi langsung dari seluruh warga negara. Rousseau percaya bahwa masyarakat harus memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Menurut Rousseau, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengikuti kehendak umum rakyat, dan bahwa rakyat harus memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan yang mengatur kehidupan mereka. Ia juga mengkritik sistem perwakilan, karena menurutnya wakil rakyat tidak bisa mewakili kepentingan rakyat secara utuh¹⁴

¹³ John Locke. 2008. *Dua Esai tentang Pemerintahan*. Terjemahan oleh M. Fanani dan Masudul Alam Choudhury. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

¹⁴ Jean Jacques Rousseau. 2007. *Du Contarct Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta: Visimedia.

Charles Louise de Secondat Baron de Montesquieu atau sering disapa Montesquieu, filsuf asal Prancis yang hidup pada abad ke-18, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam pemikiran demokrasi modern. Dalam karyanya yang terkenal, "The Spirit of the Laws," Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok orang akan berbahaya bagi demokrasi. Untuk mencegah hal tersebut, Montesquieu mengusulkan agar kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, cabang eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang, dan cabang yudikatif bertugas untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Pemikiran Montesquieu tentang pembagian kekuasaan ini menciptakan sistem pemerintahan yang mengadopsi prinsip *checks and balances*, di mana setiap cabang pemerintahan memiliki kemampuan untuk membatasi kekuasaan cabang lainnya. Melalui pemikiran dan karya-karya mereka, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu membentuk konsep-konsep mendasar tentang kedaulatan rakyat, kontrak sosial, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan.¹⁵

Teori-teori dari para pemikir tersebut memberikan landasan untuk perkembangan sistem pemerintahan demokratis modern yang lebih terstruktur dan formal pada abad ke-17 dan ke-18. Meskipun demokrasi modern yang kita kenal saat ini terus mengalami perkembangan dan variasi, pemikiran-pemikiran dari para ahli tersebut menjadi pijakan penting dalam membentuk bentuk-bentuk

¹⁵ M.Khoiril, Anam. 1997 *The Spirit of Law: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.

pemerintahan yang lebih partisipatif dan mengutamakan hak-hak individu, Yang pada akhirnya mempengaruhi tata cara pemerintahan, perumusan konstitusi dan hak-hak rakyat dalam banyak negara di seluruh dunia. Serta tetap relevan dalam perdebatan dan pembahasan demokratis tentang demokrasi hingga saat ini.

1.5.2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian ini dan membantu menunjang dalam penelitian ini. Dalam kajian pustaka, peneliti akan melakukan proses membaca, menyimpulkan, membandingkan dan mensintesis berbagai informasi yang terdapat pada sumber-sumber pustaka yang relevan. Hasil kajian pustaka akan dijadikan sebagai landasan teori atau pendukung argumentasi peneliti dalam penelitian ini. Dalam proses penelitian ini, peneliti berhasil menemukan beberapa referensi buku yang dapat digunakan sebagai sumber topik penelitian ini, Salah satu sumber utama yang telah diidentifikasi adalah buku yang ditulis oleh penulis langsung.

Pustaka pertama merupakan karya yang ditulis secara langsung oleh Mohammad Hatta, yang diterbitkan oleh Kompas Media Nusantara cetakan tahun 2011, Berjudul “Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi” Buku ini terdiri dari tiga jilid dan membahas tentang kehidupan Hatta sejak masa kecil hingga karir politiknya setelah Indonesia merdeka. Jilid pertama membahas latar belakang keluarga, pendidikan, dan karir politik Hatta sejak masa kecil hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jilid kedua membahas tentang perjuangan kemerdekaan

Indonesia, termasuk keterlibatan Hatta dalam pembentukan Partai Sosialis Indonesia, organisasi pergerakan Indonesia, dan sebagai Wakil Presiden Indonesia. Jilid ketiga membahas tentang pengalaman Hatta di dalam dan luar negeri setelah Indonesia merdeka, termasuk pandangan dan kritiknya terhadap pemerintah Indonesia saat itu. Buku ini memberikan pandangan yang unik dan berharga tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memperlihatkan pemikiran Hatta yang jauh dan progresif. Buku ini juga memberikan gambaran yang lengkap tentang kehidupan sosial dan politik Indonesia pada masa itu serta pentingnya peran tokoh-tokoh seperti Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa.

Pustaka Kedua adalah "Demokrasi: Indonesia dan Amerika Serikat" karya Azmi Sharom diterbitkan oleh Penerbit Kencana pada tahun 2011 adalah sebuah buku yang membahas sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat, serta perbandingan antara kedua negara dalam hal prinsip-prinsip demokrasi. Buku ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan praktik demokrasi di kedua negara tersebut. Isi buku ini meliputi berbagai aspek tentang demokrasi, seperti sejarah demokrasi, teori-teori demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, sistem pemerintahan, proses politik, hak asasi manusia, serta tantangan dan hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Buku ini juga mencakup pembahasan tentang pengalaman demokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk sejarah pembentukan negara dan peran masyarakat dalam membangun sistem politik yang demokratis.

Pustaka Ketiga adalah "Abraham Lincoln Hidup dan Mati Bapak Demokrasi Sepanjang Masa" karya A. Faidi, S.Hum. yang diterbitkan pada tahun

2018. Buku ini cetakan pertama dan diterbitkan oleh Penerbit Buku Laksana. Buku ini adalah biografi yang komprehensif tentang kehidupan dan karir politik Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang terkenal. Buku ini mencakup berbagai aspek kehidupan Lincoln, mulai dari masa kecilnya di pedalaman Kentucky hingga pemilihan presiden pada tahun 1860 dan akhirnya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1861. Buku ini juga membahas bagaimana Lincoln mengatasi krisis politik dan militer selama Perang Saudara Amerika serta perannya dalam mengakhiri perbudakan. Buku ini ditulis dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu peneliti memahami secara lebih mendalam kehidupan dan karir politik Abraham Lincoln. Dan membantu peneliti dalam meneliti lebih lanjut tentang topik yang akan dibahas.

1.5.3. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan adalah informasi atau temuan yang diperoleh dari proses penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti. Penelitian topik ini sesungguhnya mengacu dan pasti tidak dapat dipisahkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yang menjadikan landasan sumber referensi relevan untuk topik penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut,

Penelitian historis terdahulu yang saya dapatkan dan relevan dengan penelitian yaitu skripsi yang ditulis oleh Santi Siti Nurhayati yang berjudul “Gagasan Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta” Diterbitkan pada tahun 2016 sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di jurusan hukum tata negara Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam skripsi ini menjelaskan secara detail tentang pemikiran Mohammad Hatta mengenai konsep

kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus kajian yang dibahas, yaitu konsep demokrasi menurut tokoh Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln.

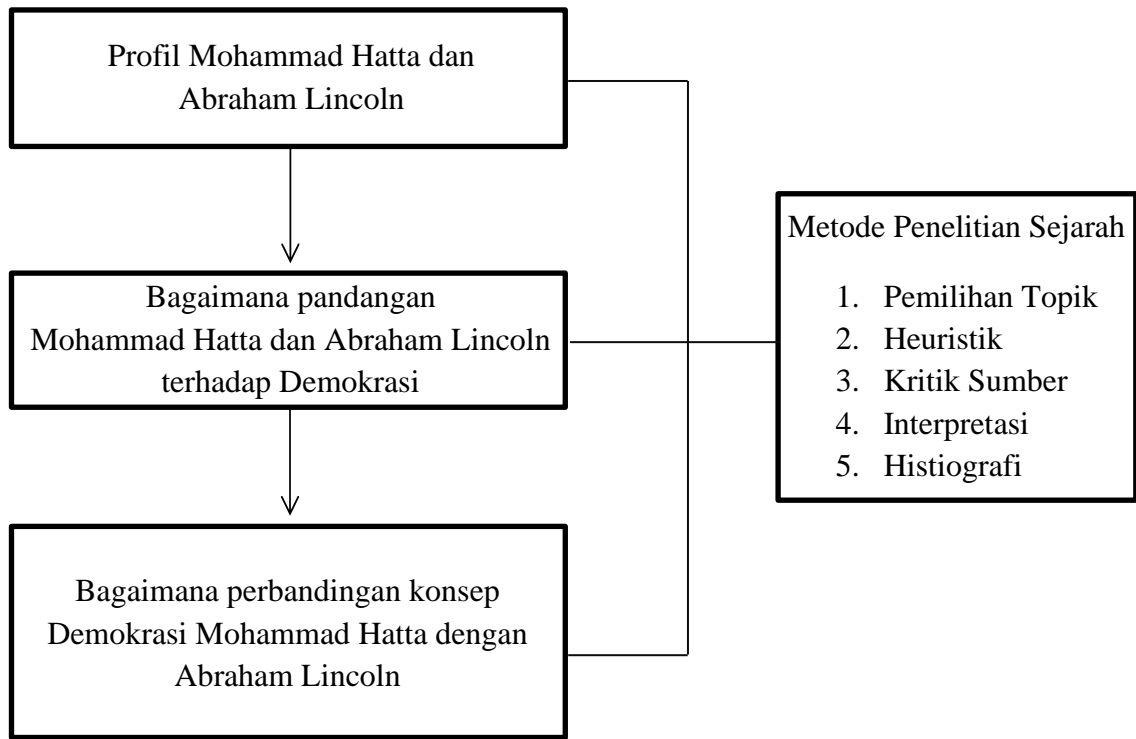
Penelitian historis terdahulu yang selanjutnya adalah yaitu makalah yang ditulis oleh Isaskhar Odon S yang berjudul "Kebijakan Politik Abraham Lincoln Terhadap Penghapusan Perbudakan di Amerika Serikat (1832-1865)" Diterbitkan pada tahun 2018 sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma. Dalam makalah dimulai dengan menjelaskan latar belakang sejarah Amerika Serikat pada masa itu, di mana perbudakan menjadi masalah yang sangat kontroversial. Pada awalnya, perbudakan dianggap sebagai hal yang wajar dan diterima di banyak negara bagian Amerika Serikat. Namun, gerakan abolisionis yang muncul pada abad ke-19 menentang praktik ini dan menyerukan penghapusan perbudakan. Makalah ini membahas peran Abraham Lincoln dalam penghapusan perbudakan. Lincoln adalah presiden Amerika Serikat yang menjabat pada periode yang sangat penting dalam sejarah negara tersebut. Dia memainkan peran penting dalam mengakhiri perbudakan melalui berbagai kebijakan politiknya, seperti Emancipation Proclamation, yang memberikan kebebasan bagi para budak. Makalah ini dapat membantu peneliti untuk memahami konsep demokrasi yang digunakan Abraham Lincoln dalam kebijakan politiknya, Perbedaan penelitian ini dan makalah yang ditulis oleh Isaskhar Odon S adalah topik yang berbeda dalam penelitian.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Raden Levina Asriana, Aim Abdulkarim, dan Kokom Komalasari dari departemen pendidikan kewarganegaraan FPIPS UPI tahun 2018, yang berjudul Kajian Pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi di Indonesia, yang membahas tentang pemikiran Mohammad Hatta terkait demokrasi di Indonesia. Jurnal ini membahas pandangan Hatta tentang demokrasi sebagai sistem politik yang cocok bagi Indonesia serta konsep negara demokrasi yang ia ajukan, Jurnal ini kemudian membahas secara rinci pemikiran Hatta tentang demokrasi dan penerapannya di Indonesia, termasuk konsep negara demokrasi yang ia ajukan. Hatta berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem politik yang cocok bagi Indonesia karena negara ini memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Hatta juga menekankan pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang mampu menciptakan masyarakat yang berbudaya demokratis. Sedangkan perbedaan yang berada di jurnal ini dan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah jurnal ini hanya membahas satu tokoh yaitu Mohammad Hatta.

1.5.4. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah sejumlah konsep atau ide yang saling terkait dan mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang akan dibahas sehingga peneliti bisa membatasi topik penelitian lalu kerangka konseptual dapat berguna sebagai pedoman untuk memberikan arah penelitian yang jelas dan terstruktur. Dalam kerangka konseptual ini, peneliti akan menjelaskan secara detail tentang pemahaman konsep dan prinsip dasar yang dianut oleh Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln terkait konsep demokrasi, sehingga dapat memperlihatkan perbedaan atau persamaan pandangan di antara keduanya.

Selanjutnya peneliti sajikan gambar kerangka berikir, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.6. Metode Penelitian

Peneliti di dalam skripsi ini menggunakan penelitian historis, yaitu penelitian yang mengkaji sumber-sumber informasi tentang masa lampau secara sistematis dan objektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang didasarkan atas pendapat Kuntowijoyo terdiri dari lima aspek, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.¹⁶

1.6.1. Pemilihan Topik

Menurut Kuntowijoyo, terdapat dua metode yang bisa diterapkan dalam menetapkan topik atau objek penelitian. Metode pendekatan pertama melalui

¹⁶ Kuntowijoyo. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm 69.

kedekatan emosional dan metode pendekatan kedua adalah melalui kedekatan intelektual.¹⁷ Pendekatan pertama adalah melalui kedekatan emosional, di mana peneliti menggambarkan ketertarikan emosional atau perasaan pribadi yang mendalam dalam menentukan dan memilih topik atau objek penelitian yang menarik perhatian. Pendekatan ini melibatkan elemen subjektif yang kuat, di mana perasaan dan pengalaman pribadi peneliti memainkan peran penting dalam proses pemilihan. Pendekatan kedua adalah melalui kedekatan intelektual, yang mencerminkan ketertarikan peneliti terhadap topik atau objek penelitian berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam.

Pendekatan ini lebih bersifat objektif dan didasarkan pada keterampilan serta penguasaan materi oleh peneliti terhadap topik yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti memilih topik karena mereka telah memiliki pemahaman yang kuat dan tentang materi tersebut. Konteks kedekatan emosional dengan topik penelitian ini terlihat jelas ketika peneliti menunjukkan ketertarikan dan minat yang mendalam terhadap pemikiran-pemikiran tokoh terkenal seperti Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln. Minat ini bukan hanya didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga pada kekaguman pribadi terhadap kontribusi dan pemikiran tokoh-tokoh tersebut, yang memotivasi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai mereka. Konteks kedekatan intelektual dengan topik penelitian menjadi semakin jelas dan terbantu setelah peneliti secara sistematis membaca dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln. Proses ini tidak hanya memperkaya pengetahuan peneliti tetapi juga

¹⁷ *Ibid.* hlm 72.

membantu dalam memperkuat dasar intelektual yang diperlukan untuk melakukan penelitian yang mendalam dan terfokus. Dengan membaca dan memahami literatur yang ada, peneliti dapat mengembangkan argumen yang lebih kuat dan analisis yang lebih mendalam tentang topik yang dipilih.

1.6.2. Heuristik

Heuristik merupakan metode dalam penelitian sejarah yang berfokus pada pencarian, pengumpulan, dan penilaian sumber-sumber sejarah yang relevan dan otentik.¹⁸ Proses ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam penelitian sejarah, karena menentukan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis dan penulisan sejarah. Dalam heuristik, peneliti berupaya menemukan berbagai bentuk dokumen, arsip, dan sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi tentang topik yang sedang dikaji. Setelah menemukan sumber-sumber potensial, peneliti melakukan penilaian keaslian dan keabsahan sumber-sumber tersebut.

Topik penelitian ini adalah pemikiran konsep demokrasi dari dua tokoh yang berbeda secara historis. Karena ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dan dalam penelitian skripsi ini, peneliti memanfaatkan instrument penelitian sistem kartu sebagai alat bantu pengumpulan data. Pemilihan metode ini didasarkan pada efektivitasnya dalam melaksanakan penelitian. Tiap data yang berhasil diakuisisi selanjutnya dicatat secara terperinci pada kartu terpisah, termasuk identitas buku atau sumber acuan. Secara substansial, kartu-kartu ini berguna untuk mencatat informasi esensial, termasuk kutipan-kutipan relevan. Pendekatan penggunaan kartu ini memungkinkan setiap kartu

¹⁸ *Ibid.* hlm 73.

membawa satu informasi khusus. Model sistem kartu yang diimplementasikan dalam konteks penelitian sejarah ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Iyus Jayusman.¹⁹ Langkah ini melibatkan pengumpulan sumber terkait dengan ruang lingkup penelitian, yang berfokus pada perspektif antara Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln terhadap pandangan Demokrasi. Sumber-sumber yang diperoleh dirujuk kepada tulisan-tulisan mengenai Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln. Berdasarkan hasil penemuan peneliti, beberapa sumbernya adalah :

1. Abraham Lincoln Hidup dan Mati Bapak Demokrasi Sepanjang Masa ditulis oleh A. Faidi, S cetakan terbit pada tahun 2018
2. Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln. Simon & Schuster ditulis oleh Doris, Kearns Goodwin cetakan terbit pada tahun 2005
3. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta ditulis oleh Zulfikri Suleman cetakan terbit pada tahun 2010
4. Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi Karya Mohammad Hatta cetakan terbit pada tahun 2011
5. Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa ditulis Deliar Noer cetakan terbit 2012

1.6.3. Kritik Sumber

Kritik sumber atau verifikasi adalah proses penting dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menilai keaslian, keabsahan, dan kredibilitas suatu sumber informasi. Proses ini terdiri dari dua jenis kritik utama yaitu, kritik ekstern dan kritik intern.²⁰ Kritik ekstern berfokus pada aspek-aspek luar dari sebuah sumber, seperti autentisitas, kondisi fisik, dan asal usul buku, dokumen atau arsip. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber tersebut benar-benar asli dan tidak

¹⁹ Jayusman, Iyus. 2008. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Tasikmalaya: Ndit Comp.

²⁰ Kuntowijoyo. *Op.cit.* hlm 77.

mengalami manipulasi atau kerusakan yang dapat mempengaruhi isinya. Kritik intern melibatkan analisis mendalam terhadap isi dari sumber tersebut. Peneliti akan mengevaluasi konsistensi internal dari informasi yang terdapat dalam dokumen. Ini mencakup penilaian terhadap adanya kontradiksi atau inkonsistensi dalam narasi yang disampaikan. Misalnya, jika sebuah dokumen mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan bagian lain dari dokumen yang sama, maka keabsahannya perlu dipertanyakan. Selanjutnya, kritik intern juga memeriksa kesesuaian informasi dalam dokumen dengan fakta-fakta sejarah yang sudah diketahui. Ini berarti membandingkan informasi dari sumber tersebut dengan data historis lain yang telah terverifikasi untuk memastikan akurasi.²¹

Contoh penerapan kritik ekstern dan intern dalam penelitian ini dapat dilihat dengan jelas ketika peneliti meverifikasi orisinal salah satu sumber. Kritik ekstern dimulai dengan memeriksa aspek-aspek fisik dan data publikasi buku. Pertama, peneliti mengidentifikasi informasi dasar seperti judul, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Buku ini berjudul "Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi" dan ditulis oleh Mohammad Hatta, seorang tokoh nasional yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 oleh Kompas Media Nusantara, sebuah penerbit yang memiliki reputasi baik di Indonesia. Peneliti kemudian memeriksa kualitas fisik buku, seperti bahan kertas, cetakan, dan penjilidan, untuk memastikan bahwa buku tersebut adalah produk asli dari penerbit resmi. ISBN buku juga diperiksa sebagai penanda keaslian dan untuk memverifikasi bahwa buku tersebut terdaftar secara resmi. Setelah aspek ekstern diverifikasi, kritik intern

²¹ M. Dien Madjid & Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.

dilakukan dengan fokus pada isi dan konteks buku. Peneliti menelaah narasi otobiografi untuk memastikan keaslian informasi yang disajikan oleh Mohammad Hatta. Ini melibatkan verifikasi fakta-fakta sejarah yang disebutkan dalam buku dengan sumber-sumber sejarah lain yang terpercaya, seperti dokumen resmi, arsip sejarah, dan karya akademis.

Peneliti juga mempertimbangkan konteks historis saat Hatta menulis otobiografi ini, serta latar belakang dan pengalaman hidupnya yang memberikan kredibilitas pada narasinya. Peneliti menganalisis gaya penulisan Hatta dan struktur buku. Gaya bahasa dan retorika yang digunakan oleh Hatta, serta bagaimana dia menyusun bab dan sub-bab dalam otobiografi, ditelaah untuk memahami cara penyampaian pesan dan cerita hidupnya. Peneliti juga mempertimbangkan tujuan penulisan otobiografi ini, apakah untuk memberikan wawasan pribadi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk mendidik generasi mendatang, atau untuk membela atau memperkuat posisi politik tertentu. Peneliti mencari tanda-tanda bias subjektif yang mungkin memengaruhi interpretasi peristiwa sejarah dalam buku ini. Dengan menerapkan kritik ekstern dan intern ini, peneliti dapat memastikan bahwa buku "Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi" karya Mohammad Hatta adalah sumber yang dapat dipercaya dan valid untuk digunakan dalam penelitian Sejarah ini.

1.6.4. Interpretasi

Interpretasi adalah teknik analisis terhadap data atau bahan sumber yang telah dikumpulkan. Tujuan dari interpretasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap data atau bahan sumber yang telah dikumpulkan.

Penafsiran data sejarah adalah tahapan penting dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memberikan makna dan konteks pada informasi yang telah dikumpulkan. Tanpa interpretasi, data-data tersebut hanya akan menjadi kumpulan informasi yang tidak terkait satu sama lain. Interpretasi menempatkan informasi-informasi tersebut dalam kerangka konstruksi masa lalu yang memungkinkan kita untuk memahami dan menjelaskan dinamika sejarah.²² Informasi historis tidak selalu mencatat semua detail kejadian di masa lampau secara utuh. Itulah sebabnya, penting bagi peneliti untuk menafsirkan informasi tersebut agar menjadi rangkaian yang bermakna dan konsisten.

Tafsiran ini juga bermanfaat dalam mengidentifikasi keterkaitan sebab-akibat serta menyusun argumentasi yang kokoh terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam proses penelitian. Dalam melakukan interpretasi, peneliti melakukan dua tahapan utama, yaitu analisis dan sintesis. Tahapan analisis melibatkan penguraian data-data yang ditemukan dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Ditahap konteks ini peneliti memanfaatkan metode resensi sumber yang didapatkan dari sumber primer yaitu buku, jurnal dan arsip yang berkaitan dengan tentang topik Hatta dan Lincoln dengan tujuan mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan agar prosesnya menjadi lebih efisien dan efektif. Setelah data sumber yang telah ada dikumpulkan lalu dianalisis secara cermat dan teliti. Kemudian peneliti melanjutkan tahap berikutnya yaitu tahapan sintesis yang sangat

²² Eva Syarifah Wardah. 2014. "Metode Penelitian Sejarah," *Tsaqofah* 12, no. 2. hlm 163–175. Hlm. 172

penting dalam berperan mengintegrasikan data – data sumber tersebut menjadi satu rangkaian peristiwa atau topik sejarah yang terstruktur dengan baik.

1.6.5. Historiografi

Menurut Kuntowijoyo, tahap terakhir dari metode sejarah adalah historiografi. Historiografi ini meliputi penulisan dan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam pandangan Kuntowijoyo, penulisan sejarah yang baik haruslah terstruktur dengan baik dan disusun secara runtut menurut urutan kronologis.²³ Hal ini penting agar pembaca dapat mengikuti alur peristiwa dan memahami konteks sejarah dengan jelas. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa penyajian tulisan sejarah yang ideal harus terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. Di tahap ini peneliti akan menyusun penelitian pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan atau jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang topik penelitian profil Mohammad Hatta dengan Abraham Lincoln, pandangan konsep demokrasi Hatta dan Lincoln, serta perbandingannya tentang konsep demokrasi Mohammad Hatta dengan Abraham Lincoln.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian berjudul Perbandingan Konsep Demokrasi Menurut Mohammad Hatta (1945) Dan Abraham Lincoln (1865) Naskah pembahasan ini akan disusun menjadi beberapa bab yang setiap babnya akan menyajikan berbagai aspek topik yang dibahas tertentu secara mendetail.

²³ Kuntowijoyo. *Op.cit.* hlm 88.

Pertama, BAB I sebagai bab pendahuluan akan memuat latar belakang masalah dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan dari penelitian, landasan teoritis, dan metode penelitian.

Pada BAB II peneliti bakal menjelaskan mengenai profil Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang profil dan objek penelitian .

Pada BAB III Peneliti akan menyajikan pembahasan mengenai konsep demokrasi menurut Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln.

Pada BAB IV peneliti akan menyajikan pembahasan perbandingan konsep demokrasi antara Mohammad Hatta dan Abraham Lincoln tentang persamaan dan perbedaan pandangan demokrasinya antara Hatta dan Lincoln.

Pada BAB V peneliti akan menyajikan kesimpulan dari ringkasan seluruh pembahasan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.